

SKRIPSI

**SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN**



Nomor Induk Mahasiswa : 105611118218

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

SKRIPSI
SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan oleh :

FITRIANI AMIR

Nomor Induk Mahasiswa : 105611118218

Kepada :

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam
Pemberdayaan Anak Jalanan
Nama Mahasiswa : Fitriani Amir
Nomor Induk Mahasiswa : 105611118218
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Muhammad Yahya, M.Si

Mengetahui :

Dekan

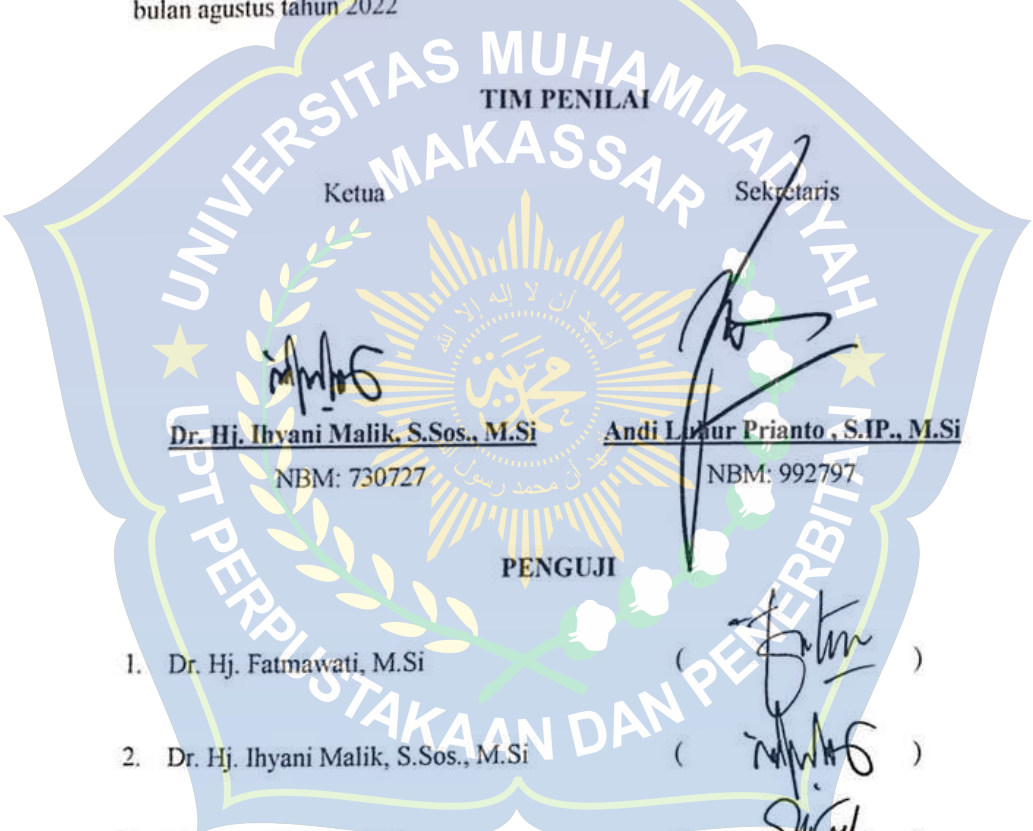
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM.730727

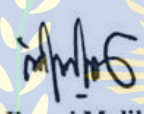
Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM.991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 060/FPS/A.4-II/VII/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 06 bulan agustus tahun 2022



TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
	
<u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u>	<u>Andi Luthur Prianto, S.IP., M.Si</u>
NBM: 730727	NBM: 992797

PENGUJI

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si	()
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	()
3. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si	()
4. Hardianto Hawing, ST., MA	()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fitriani Amir

Nomor Induk Mahasiswa : 105611118218

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Juni 2022

Yang Menyatakan,


Fitriani Amir

ABSTRAK

FITRIANI AMIR, Tahun 2022 Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh pembimbing I Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si dan pembimbing II Dr. Muhammad Yahya, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas pemerintah Kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan dengan mengacu pada indikator sinergitas yaitu koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer. Dalam penelitian ini, pengambilan informan ditentukan secara *purposive sampling*. Teknik pengambilan informannya dengan mengacu pada informan yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian, dengan informan yang terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan Anjal (Anak) Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar, Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Makassar, pekerja sosial RPTC dan anak jalanan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sinergitas dalam pemberdayaan anak jalanan dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dengan indikator : Koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial dengan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) namun masih bersifat personal dan belum ada gambaran teknis untuk pembinaan pendidikan. Kemudian komunikasi dilakukan dengan pembentukan unit pelaksana teknis pemberdayaan anak jalanan. Adapun sinkronisasi dengan adanya keserasian antara aturan kerja yang berlaku dengan hasil kerja yang diperoleh untuk pemberdayaan anak jalanan yang putus sekolah.

Kata Kunci : *Sinergitas, Pemberdayaan, Anak Jalanan*

ABSTRACT

FITRIANI AMIR, In 2022 Makassar City Government Synergy in Empowering Street Children, Thesis of Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by supervisor I Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si and advisor II Dr. Muhammad Yahya, M. Si

This study aimed to find out the synergy of the Makassar City government in empowering street children. This study used qualitative methods. Data sources consisted of primary data obtained through interviews, and secondary data taken from documents, records, reports, and official archives that could be supported by the integrity of primary data. The results showed that the synergy in empowering street children was carried out by the Social Service and the Makassar City Education Office. With indicators: Coordination carried out by the Social Service by forming a Quick Reaction Team (TRC) but it was still personal and there was no technical picture for education development. Then communication was carried out by establishing a technical implementing unit for the empowerment of street children. As for the synchronization with the harmony between the applicable work rules and the work results obtained for the empowerment of street children who dropped out of school.

Keywords: Synergy, Empowerment, Street Children

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan terimakasih kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan pertolongannya jugalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan seksama. Serta tidak lupa pula *sholawat* dan *salam* penulis sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau dahulu sehingga saat ini kita dapat rasakan manisnya islam dan iman sebagai agama yang kita anut.

Skripsi yang berjudul **"Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan"** yang dalam penulisan skripsi ini banyak ditemui berbagai hambatan dan rintangan. Namun dengan kesungguhan yang dimiliki penulis serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk Ibu Hj.Hartawati dan bapak Amirudin selaku orang tua penulis yang telah menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, karena berkat dukungannya, kasih sayang, cinta, dan doa dalam mengasuh dan mendidik peneliti dengan sabar dan ikhlas membimbing peneliti dari kecil hingga saat ini, semoga menjadi amal ibadah bagi mereka dan Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan hidayahnya kepada mereka.

maka penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Sekaligus pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. Nur Wahid,S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Nurbiah Tahir,S.Sos.,M.AP Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
6. Terimakasih kepada seluruh pengelola Dinas Sosial Kota Makassar yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
7. Terimakasih kepada seluruh pengelola Dinas Pendidikan Kota Makassar yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
8. Seluruh dosen yang telah memberikan pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan akademik, serta pegawai tata usaha yang telah banyak membantu mahasiswa dalam proses kelancaran kegiatan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar.
9. Terimakasih untuk kakakku Riswandi Amir dan Kakak iparku Siti Namira yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

10. Kepada sahabat-sahabatku sejak SMA Makbulan, Ruslia, Dwi, Christie, yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
11. Saudara-saudara seperjuanganku TATG 2018
12. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara kelas D 2018
13. Dan terakhir untuk diri sendiri terima kasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terima kasih sudah mau bangkit lagi walaupun rasanya sulit, tapi kamu akan lihat bahwa kamu kuat bisa melewatinya. *Just dont give up, everything its gonna be fine!*

Akhirnya penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua pada umumnya dan kepada pembaca skripsi ini khususnya sebagai bahan wawasan dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan ilmiah *Aamiin Ya Rabbal Alamin*

Makassar, 30 Juni 2022


Fitriani/Amir

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	Error!
Bookmark not defined.	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Penelitian Terdahulu.....	5
B. Teori dan Konsep.....	9
1. Teori dan Konsep Sinergitas.....	9
2. Teori dan Konsep Pemberdayaan.....	15
3. Teori dan Konsep Anak Jalanan.....	24
C. Kerangka Pikir.....	27
D. Fokus Penelitian.....	28
E. Deskripsi Fokus.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

A. Waktu dan Lokasi.....	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Teknik Pengabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	37
B. Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.....	51
C. Bentuk Koordinasi, Komunikasi, Sinkronisasi Dari Sinergitas Dinas Sosial Dan Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan...	58
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu	5
Tabel 2. Informan Penelitian	36
Tabel 3. Data Anak Jalanan	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.....	27
Gambar 2. Tujuan Pembinaan Anak Jalanan.....	56
Gambar 3. Data Hasil Anak Jalanan.....	60
Gambar 4. Home visit & Pendataan oleh Dinas pendidikan.....	61
Gambar 5. Koordinasi Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia yang kemudian di turunkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara,

Salah satu permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia khususnya di kota-kota besar adalah permasalahan anak jalanan, pengamen, dan juga gelandangan. Kehidupan masyarakat perkotaan terdapat celah kehidupan yang sangat mempriatinkan dengan munculnya kehidupan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di persimpangan jalan, keramaian lalu lintas yang tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Perbedaan yang sangat menonjol pembangunan secara fisik tidak di imbangi dengan pembangunan moral bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan didalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan di lintas sektoral perlu ditingkatkan guna mengangkat citra bangsa didunia Internasional bahwa kebangkitan suatu bangsa ditandai dengan pedulinya masyarakat terhadap kehidupan anak jalanan yang kian hari makin bertambah (Nurdin, 2013).

Kementrian Sosial memperkirakan setidaknya terdapat sekitar 50.000 anak yang tinggal dan mencari nafkah di jalan di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 1999. Namun mereka sendiri memperkirakan bahwa anak jalanan berjumlah jauh di atas 50.000 anak. Banyak pihak yang juga menyakini bahwa jumlah anak jalanan yang sesungguhnya diatas data yang disebutkan kementerian sosial. Berbagai perkiraan mengenai jumlah anak jalanan yang ada berkisar antara 50.000-170.000 anak. Ini berarti jumlah anak jalanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana mengurangi jumlah anak jalanan, pengemis dan gelandangan.

Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).⁴ Hal ini sangat memperlihatkan, tentunya fenomena ini tidak terlahir dari faktor tunggal arus modernisasi ada hal lain yang melatar belakangi sebagai contoh krisis ekonomi yang tak kunjung usai, yang mengakibatkan perkembangan jumlah anak jalanan dan putus sekolah yang belakangan ini semakin menggelembung. Seiring perkembangan pesat anak jalanan dan anak putus sekolah di berbagai sudut jalan, selain memprihatinkan dari segi kemanusiaan di sisi yang sama ternyata ada juga yang melahirkan permasalahan sosial baru yang cukup meresahkan.

Saat ini anak jalanan menjadi masalah serius terutama di ibu kota provinsi dan kota-kota besar termasuk Kota Makassar. Keberadaan mereka kerap kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban dan keamanan perkotaan. Saat ini kota Makassar

berkembang pesat, bangunan pisik, pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah telah lama mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan daerah khusus di Kota Makassar diatur dalam peraturan daerah No 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. Pemerintah daerah dalam peraturan daerah tersebut sendiri telah mencanangkan beberapa program pembinaan, rehabilitasi dan pengalokasian anak jalanan

Banyak permasalahan yang dialami oleh anak jalanan, diantaranya adalah tidak memiliki tempat untuk tinggal, terluntang-lantung di jalanan, putus sekolah bahkan terjadi kekerasan pada anak. Anak jalanan perlu menjadi masalah serius sehingga diperlukan sinergitas yang baik oleh pemerintah. Pentingnya koordinasi komunikasi, dan sinkronisasi oleh pemerintah dan stakeholder agar terwujud sinergitas yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan ”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Koordinasi dalam Sinergitas Pemerintah Kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan
2. Bagaimana bentuk komunikasi dalam Sinergitas Pemerintah Kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan

3. Bagaimana bentuk Sinkronisasi dalam Sinergitas Pemerintah Kota Makassar dalam memberdayakan anak jalanan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk Koordinasi dalam Sinergitas Pemerintah Kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan.
2. Untuk mengetahui bentuk komunikasi dalam Sinergitas Pemerintah Kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan
3. Untuk Mengetahui bentuk Sinkronisasi dalam Sinergitas Pemerintah Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk Mahasiswa yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dari Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini diuraikan dalam tabel beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan judul yang diajukan penulis.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Metode Penelitian	Penelitian Terdahulu	Kesimpulan
1.	Maulidar, 2019 ”Sinergitas kegiatan pusat pelayanan kesejahteraan sosial (studi kasus kegiatan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pendamping program keluarga harapan dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh	Deskriptif kualitatif	Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pendamping program keluarga harapan, sedangkan fokus penelitian saya adalah sinergitas pemerintah dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan TKSK maupun Pendamping PKH di Kecamatan Indrapuri selama ini sudah bersinergi. TKSK dan Pendamping PKH saling kerjasama dan membantu satu sama lain, terutama dilihat dari proses kerjasama dalam bimbingan atau pengarahan, kerjasama dalam pendataan dan kerjasama dalam pembantuan.

	Besar)”		pemberdayaan anak jalanan	Adapun faktor pendukung terjalannya kerjasama tersebut adalah adanya fasilitas kerja seperti komputer, kantor, dan alat berkomunikasi (Handphone). Sedangkan faktor penghambat terjalannya kerjasama yaitu tidak memiliki kendaraan yang cukup bagi Pendamping PKH sehingga para pendamping kebanyakan menggunakan kendaraan milik keluarganya, jika mendapat tugas mendadak. Bahkan terkadang mereka terpaksa meminjam kendaraan tetangga. Faktor penghambat yang lain adalah tidak ada laptop yang diberikan khusus bagi Pendamping PKH, ketika mereka melakukan bimbingan ke lapangan (Maulidar, 2019).
2.	Almira Rahmaveda,	Deskriptif	Perbedaan dari	Hasil penelitian menunjukkan

	2017 <i>“Pemberdayaan anak jalanan di kota Surabaya (sinergitas antar stakeholders dalam peningkatan kemandirian anak jalanan “</i>	kualitatif	penelitian ini yaitu fokus penelitian ini bagaimana sinergitas pemerintah dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan, sedangkan penelitian saya di fokuskan pada bagaimana Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan	bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan masing-masing stakeholders telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya namun, mereka belum memiliki program yang serasi atau berkesinambungan anatar satu instansi dengan nstansi lainnya. Anak jalanan tidak terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, anak jalanan juga tidak mendapatkan pemberdayaan secara berkala, dalam satu tahun pelakasanaan pelatihan untuk anak jalanan hanya diselenggarakan satu bulan saja (Almira.R, 2017).
3.	Lina Nurjannah,2011 <i>“Pemberdayaan anak jalanan di kota Malang melalui</i>	Deskriptif kualitatif	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada tempat penelitian dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak jalanan di Kota Malang pada umumnya menempati daerah-daerah

kemitraan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Griya Baca Kota Malang)		berfokus pada pemberdayaan melalui kemitraan antara pemerintah dan lembaga swadaya, sedangkan penelitian saya berfokus pada sinergitas pemerintah kota Makassar dengan stakeholder yang menaungi anak jalanan	strategis seperti alun-alun Kota Malang, perempatan jalan Ahmad Yani, Matos, Terminal Arjosari, dan seputaran Jagalan serta Muharto. Jumlah anak jalanan di Kota Malang tidak menentu, karena mobilitas anak jalanan yang cenderung dinamis untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sistem drop-dropan anak jalanan dari luar Kota Malang ketika mendekati hari besar akan semakin meningkatkan jumlah anak jalanan di Kota Malang. Faktor penghambat dalam memberdayakan anak jalanan oleh Bidang Sosial dan LPA Griya Baca adalah terbatasnya dana, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran anak jalanan untuk mengikuti pelatihan, dan
--	--	--	---

				database secara menyeluruh tentang anak jalanan masih belum terkumpul di satu lembaga yaitu Bidang Sosial karena mobilitas anak jalanan yang selalu berpindah-pindah. Hal ini menyebabkan program bantuan dan tujuan akhir dalam memberdayakan anak jalanan tidak maksimal (Lina.N, 2011)
--	--	--	--	--

B. Teori dan Konsep

1. Teori dan Konsep Sinergitas

a. Definisi Sinergitas

Sinergitas mempunyai beberapa pengertian atau definisi tetapi pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut kamus saku *Oxford-Inggris* (<http://www.encyclopedia.com>) bahwa sinergitas adalah interaksi atau kerja sama antara dua atau lebih suatu organisasi, unsur atau agency untuk menghasilkan kombinasi hasil kinerja yang lebih besar daripada jumlah hasil yang dikerjakan secara sendiri-sendiri, seperti dalam teks aslinya :

Menurut Covey (2004), sinergitas menggambarkan cara bekerja dalam suatu kelompok. Melakukan pemecahan masalah secara efektif, melakukan kerjasama dalam

pengambilan keputusan, adanya perbedaan nilai-nilai dan membangun kekuatan berbasis perbedaan. Hal itu ditanamkan terus menerus dan ketika sinergi menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok maka hasil kerja sama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing anggota saat bekerja secara sendiri.

Sinergitas merupakan hasil menciptakan suasana lingkungan dimana orang-orang yang berbeda dapat saling memberi sumbangannya berdasarkan kekuatan masing-masing sehingga hasilnya lebih besar dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri.

Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan daripada sikap yang apatis ataupun konfrontasi. Sinergi berbeda dengan kompromi, karena dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama.

Adapun sinergi dalam konteks manajemen, menurut Mulyana (2007) adalah bersama-sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Setiap anggota di dalam organisasi mempunyai perasaan harmoni dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka menuntaskan dengan baik dan penuh kegembiraan. Syarat utama penciptaan sinergi terlihat dari : kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreatifitas.

Dari beberapa pengertian menunjukkan bahwa sinergitas sangat penting dalam kelompok atau tim, organisasi maupun suatu *agency* karena dengan bekerja secara sinergi akan menghasilkan energi atau kekuatan yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang diinginkan dan melebihi jumlah yang dihasilkan apabila

dike~akan secara sendiri (*The whole is greater than the sum of its parts*).

Menurut Slamet Mulyana (2008) dalam tulisannya sinergitas yakni :

1) Koordinasi

Koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertical, hubungan horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Sinergitas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatakegiatan individual dan unit-unit kedalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama (Silalahi,2011).

Menurut Stooner dalam Ni'matin (2013:17) mengatakan koordinasi merupakan aktifitas dan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerja sama yang selaras dan tertib mengarah kepada tercapainya tujuan koordinasi secara menyeluruh, jika koordinasi berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi semerautan, kekacauan, tumpang tindih atau kekosongan kerja serta unsur-unsurnya terdiri dari: Perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan.

Selanjutnya menurut Siagian (2008:110) koordinasi adalah pengaturan tata hubungan usaha bersam untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula.

Sementara menurut Hasibuan (2009:85) mendefinisikan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan unsur-unsur manajemen (man, money, material, machine, methode, market) dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Awaluddin (2009:86)

mendefinisikan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Manager yang sukses adalah manager yang dapat melakukan koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi dengan baik.

2) Komunikasi

Dalam komunikasi pertukaran informasi antara dua lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96), ada setidaknya 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: komunikasi (communication), sumber daya manusia (resource), sikap (disposition), dan struktur birokrasi (beureucratic structure).

Aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja, pada umumnya bertujuan untuk:

- a. meningkatkan hubungan kerja dan kerja sama yang baik antar individu dan antar unit organisasi atau departemen.
- b. mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit organisasi.
- c. mengurangi aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustrasi; 4. mendorong semangat kerja (Gondokusumo, 1980 : 2).

Pendapat lainnya menurut Ross dkk., (2003) bahwa untuk mewujudkan sinergitas dalam organisasi, maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah :

a. Mengembangkan pendekatan visioning, perencanaan dan tanggung jawab dalam kelompok. Sinergitas dapat terjadi pada suatu kelompok hanya ketika anggota kelompok sangat menyukai tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini mengharuskan setiap anggota dalam kelompok memahami bagaimana peran atau tugas mereka secara individu dan tugasnya dalam kelompok secara keseluruhan dengan nilai-nilai, arah ke depan dan misi yang diemban. Selanjutnya sinergitas mengharuskan seluruh anggota merasa ada kesamaan visi dan menyetujui strategi yang digunakan untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu hal yang dibutuhkan dalam organisasi adalah :

- 1) Menyediakan waktu bagi anggota kelompok untuk menjamin kesamaan pemahaman tentang visi, sasaran, perencanaan dan nilai-nilai yang menyertainya.
- 2) Melakukan konsesus-konsesus untuk melakukan strategi pengembangan dan pengambilan keputusan. Hal ini menyediakan setiap anggota kesempatan untuk mempengaruhi hasil keputusan. Mendorong seluruh tim untuk melatih kepemimpinan dan rasa tanggung jawab.

- a) Menilai seluruh anggota kelompok secara sama untuk mencapai sinergitas, kondisi lingkungan organisasi sangat menentukan dan menghindari terjadinya kompetisi. Untuk itu agar suasana lingkungan organisasi dapat terpelihara berkelanjutan, maka:

- Menunjukkan dalam organisasi bahwa seluruh anggota kelompok adalah bagian penting menuju kesuksesan organisasi.
 - Menghindari penilaian sepihak, sebaliknya justru harus mendorong seluruh anggota belajar dari kesalahan atau permasalahan.
 - Seorang pemimpin harus menghindari dalam mengevaluasi anggota kelompok relatif lebih baik dari kelompok lain atau menganggap kelompok satu lebih penting daripada kelompok lainnya.
 - Membantu anggota untuk memahami kepentingan tugas spesifiknya dan kaitannya dengan kegiatan keseluruhan dalam organisasi.
- b) Berusaha menjaga dan memelihara saling percaya, Percaya berarti anggota kelompok mempunyai harapan yang sama bahwa tujuan bersatunya adalah tidak akan melakukan segala sesuatu atas dasar kesalahan dengan sengaja. Kepercayaan tidak dapat bertahan lama melalui kekuatan dan pengawasan seperti pada paradigma tradisional. Strategi pengawasan memerlukan tindakan, kekuatan dan kebohongan untuk mempertahankan bayangan bayangan kekuatan di atas kekuatan yang lain.

3) Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Adanya kejelasan pembagian tugas merupakan petunjuk pelaksanaan sinkronisasi.

Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu. Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhannya itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama (Syafie, 2005).

Sinkronnya rencana kelola dengan kondisi faktual di lapangan yang berazaskan kelestarian, keserasian serta azas pemanfaatan yang optimal dapat memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi serta sosial dan berimbang (Rizal, dkk, 2011).

2. Teori dan Konsep Pemberdayaan

a. Definisi Pemberdayaan

Kata-kata pemberdayaan, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti berarti kekuatan dalam diri manusia suatu sumber kreativitas. Istilah pemberdayaan diartikan, sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi, masyarakat, dengan upaya pendayagunaan, potensi pemanfaatan sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.

Masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan.

Menurut Shardlow, pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk, masa depan sesuai dengan Konsep pemberdayaan merupakan upaya, mencari bentuk konsep pembangunan yang ideal setelah berbagai paradigma pembangunan sebelumnya gagal, memenuhi harapan sebagian besar umat manusia. Menurut Hikmat definisi pemberdayaan dari beberapa ahli, sebagai berikut :

“Pada dasarnya pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial, menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-hak menurut undang-undang. Sementara itu McArdle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses, pengambilan keputusan, oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.

Orang-orang telah melaksanakan tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandirian, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lain dalam rangka, mencapai tujuan mereka tanpa, tergantung pertolongan dari hubungan eksternal. McArdle mengimplikasikan makna tersebut bukan untuk mencapai tujuan melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Adapun menurut Payne yang dikutip oleh Adi (2003) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*Empowerment*), pada intinya ditunjukkan :

“Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya ingat yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Pendapat Payne diatas mengemukakan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui transfer daya guna mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Sedangkan Suharto (2005) memberikan definisi pemberdayaan sebagai berikut : Pemberdayaan berarti menyediakan, memberikan, sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat, guna meningkatkan keterampilan mereka dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempunyai dampak pada kehidupan masyarakat dimasa depan).

Menurut Biestek dikutip oleh Adi mengemukakan bahwa pemberdayaan di bidang kesejahteraan sosial dikenal dengan “*Self determination*” yang dikenal sebagai salah satu prinsip dasar dalam bidang pekerjaan sosial

Kartasmita (1996) mendefinisikan bahwa pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia atau masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan.

Lebih lanjut, Kartasasmita mendefinisikan bahwa pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia atau masyarakat yang dalam kondisi, sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan adalah proses daya individu kelompok yang tidak beruntung atas pilihan pribadi, penentuan kebutuhan, gagasan, lembaga, sumber, aktifitas ekonomi, dan reproduksi, melalui kebijakan sosial, aksi politik dan Pemberdayaan menunjuk, pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam :

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 2) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan bisa diartikan juga sebagai perubahan kepada arah yang lebih baik, dari tidak berdaya menjadi berdaya, pemberdayaan terkait dengan upaya meningkatkan taraf kehidupan ketingkat yang lebih baik. Pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menguunakan

daya yang dimiliki, tentunya dalam menentukan kearah yang lebih baik lagi.

Sedangkan menurut Handoko (2014) Pemberdayaan adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan melakukan pembaharuan. Sekilas jika definisi tersebut diperhatikan memang terdapat perbedayaan, tetapi mengandung arti yang sama, oleh karena itu penulis mencoba menyimpulkan mengenai batasan definisi pemberdayaan berdasarkan informasi diatas sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan adalah mengembangkan dari keadaan tidak berdaya menjadi berdaya.
- 2) Pemberdayaan dilakukan melalui proses yang cukup panjang dan dilakukan secara kontinyu untuk menuju kearah yang lebih baik.
- 3) Pemberdayaan bisa diartikan sebagai perubahan yang lebih meningkat.
- 4) Pemberdayaan bisa diartikan sebagai pengembangan.

b. Program dan Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Bila program selesai maka dianggap pemberdayaan sudah selesai. Hal ini banyak terjadi pada pembangunan berdasarkan proyek yang banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, dimana proyek yang satu dengan yang lainnya kadangkala tidak berhubungan, bahkan tidak saling mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh bagian yang lain meskipun itu dalam lembaga yang sama. Sedangkan pada beberapa organisasi non pemerintah kegiatannya tidak jarang juga terputus

karena telah berakhirnya dukungan dana dari pihak donor.

Di sini terlihat bahwa pemberdayaan sebagai suatu program yang harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan kepada upaya-upaya yang membuat masyarakat agar lebih pandai, mampu mengembangkan komunikasi antara mereka, sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi ketika si agen perubah yang berasal dari luar, baik itu dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, telah menyelesaikan programnya maka pemberdayaan sebagai proses tetap berlangsung pada kelompok sasaran tersebut.

Proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh Prajono & Pranarka, (1996) mengandung dua kecenderungan :

- 1) Kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun assetnya material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
- 2) Kecenderungan sekunder, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses menstimulus, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau berdaya untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Selanjutnya Rubin dalam Sumaryadi (2005) "*Central to empowerment is*

illingnessto challenge formal authority and to escape dependency on those in power” diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja.

Dapat dilihat apa yang dikemukakan oleh Hogan (2000) pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri.

Hogan dalam Adi (2003) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima (5) tahapan utama:

- 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall dopowering/empowering experience*).
- 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidak perdayaan (*discuss reasons for depowerment/empowerment*)
- 3) Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek (*identify one problem orproject*)
- 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna (*identify usefull power bases*)
- 5) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan

(*develop and implement actions plans*) Dari pernyataan diatas tergambar mengapa Hogan meyakini bahwa proses Pemberdayaan yang terjadi pada tingkat individu tidak, berhenti pada suatu titik merupakan *on-going* proses bukan berarti meniadakan masalah, akan tetapi

pemberdayaan tersebut mempersiapkan struktur dan sistem dalam komunitas agar dapat bersikap proaktif dan responsive terhadap kebutuhan komunitas dan permasalahan yang ada dan dapat muncul dalam komunitas tersebut.

c. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Tahapan pengembangan masyarakat ataupun program pemberdayaan masyarakat yang merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai kemajuan ketaraf yang lebih baik.

Adapun upaya untuk pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan yaitu :

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- 3) Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi.

Untuk lebih memperjelas rincian dari masing-masing tahap tersebut akan diuraikan secara singkat tahap-tahap pemberdayaan oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019:13) yaitu :

1) Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan suksesnya suatu program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non direlatif.

2) Tahap Pengkajian

Pada assessment yang dilakukan disini dapat dilakukan secara individual melalui tokoh masyarakat, tetapi dapat juga melalui tokoh-tokoh masyarakat, tetapi dapat juga melalui kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahap ini petugas sebagai agen berusaha mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga daya yang dimiliki klien. Dalam melakukan assessment ini

3) Tahap Perencanaan Alternative Program atau Kegiatan.

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubah secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk

4) Tahap Performulasian Rencana Aksi

Pada pemformulasian rencana aksi ini, diharapkan petugas dan masyarakat dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian mereka dapat mengarahkan tindakan itu dengan apa yang sudah diformulasikan.

5) Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat. Karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam maupun kerja sama antara warga. Pertentangan antara kelompok warga juga dapat menghambat pelaksanaan suatu program ataupun kegiatan.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu system dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Evaluasi itu sendiri dapat dilakukan pada, proses (yang juga dikenal sebagai pemantauan atau monitoring) dan juga pada hasil. Bila sistem ini sudah terpolakan dan terinternalisasikan pada sebagian besar kelompok masyarakat, maka dapat diharapkan perubahan yang terjadi akan dapat menjadi relatif menetap.

3. Teori dan Konsep Anak Jalanan

Anak jalanan dapat dipahami sebagai anak yang karena sebab-sebab tertentu masuk ke dalam kehidupan jalanan untuk tujuan mencari nafkah dan memperoleh penghasilan. Anak jalanan merupakan bagian dari komunitas kota, mereka menyatu dengan kehidupan jalanan kota, dimana jalanan menjadi lapangan hidup, tempat memperoleh pengalaman hidup, dan sarana untuk mencari penyelesaian masalah

ekonomi maupun sosial. Keberadaan mereka menjadi salah satu ciri kehidupan perkotaan terutama kota-kota besar, sehingga hampir tidak ada kota yang tanpa anak jalanan (Ronawati, 2011).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun serta sebagian waktu mereka di habiskan di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam untuk melakukan aktivitas ekonomi. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya (Sakman, 2008).

Ciri-ciri anak jalanan pada dasarnya anak-anak kaum marginal tau kaum terpinggirkan di perkotaan, Mereka bukan saja mampu bertahan hidup dengan kehidupan di kota yang keras, ada pun ciri-ciri anak jalanan secara umum yaitu Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, dan tempat-tempat hiburan) selama 24 jam (Anggara, 2016).

Lebih lanjut, berikut diuraikan ciri-cirinya:

- 1) Berpendidikan rendah (putus sekolah)
- 2) Berasal dari keluarga yang tak mampu
- 3) Melakukan aktifitas ekonomi (mencari nafkah di jalan)
- 4) Tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang

- 5) Tidak mau bertatap muka dalam arti bila mereka di ajak bicara, mereka tidak mau melihat orang lain secara terbuka
- 6) Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak, mereka sangatlah labil
- 7) Mereka memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai bila di ukur dengan ukuran normatif masyarakat umumnya.

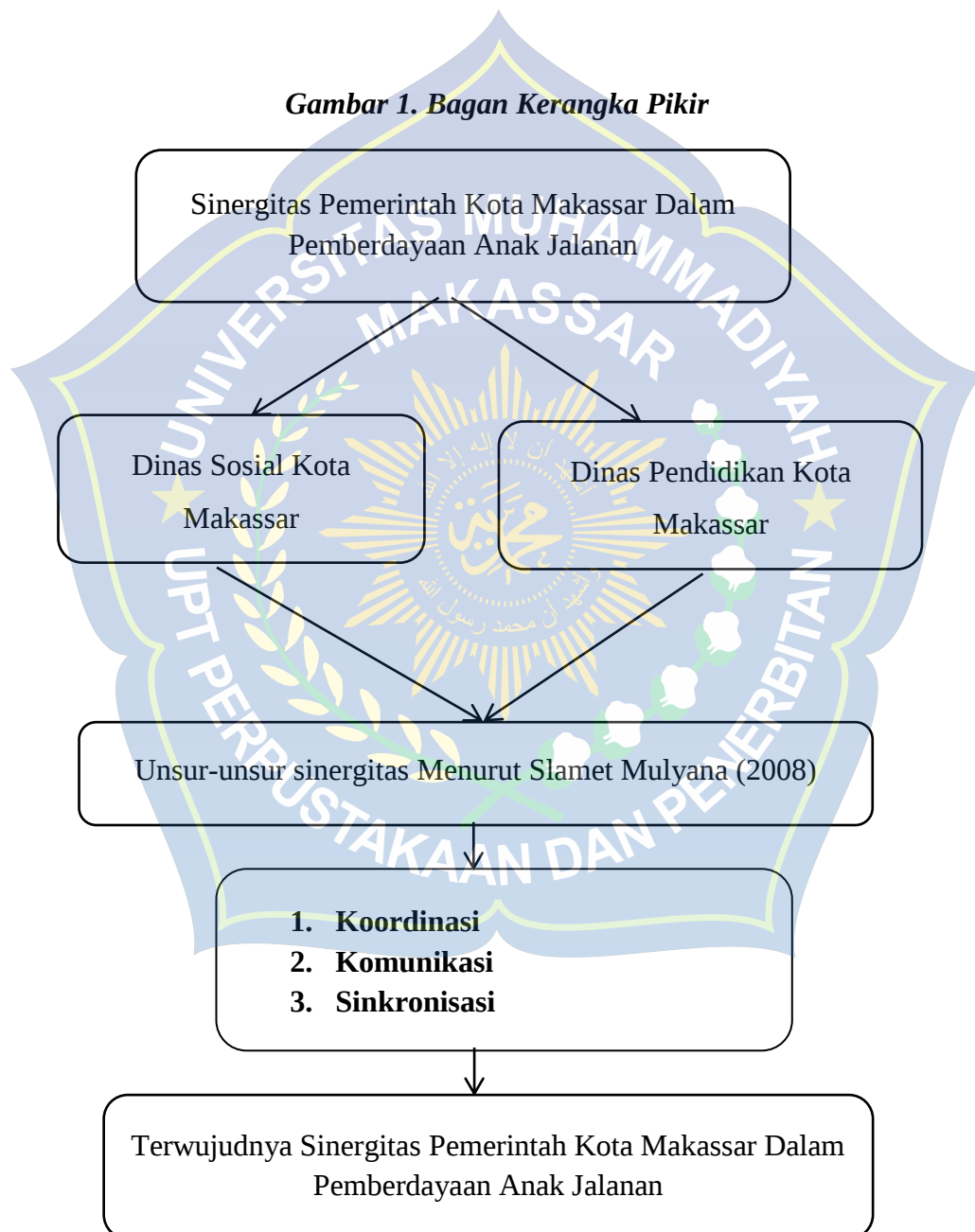
Selain itu ada juga ciri-ciri fisik dan psikis anak jalanan. Secara fisik warna kulit anak jalanan kusam, kemudian memiliki rambut yang kemerah-merahan karena sering terkena sinar matahari, selain itu juga anak jalanan berbadan kurus dan memakai pakaian yang tidak terurus. Kemudian ciri dari psikis dari anak jalanan adalah mereka terkadang memiliki sikap acuh tak acuh, kemudian biasanya juga mereka penuh curiga dan sangat sensitif. Anak jalanan juga biasanya berwatak keras namun memiliki kreativitas serta semangat hidup yang tinggi, kemudian dalam kehidupannya anak jalanan berani menanggung resiko dan mandiri.

Faktor utama yang mempengaruhi anak berada di jalan untuk mencari nafkah adalah **pertama** faktor ekonomi kurangnya pendapatan orang tua membuat anak harus ikut mencari nafkah di jalan entah dengan menjadi pengamen, pengemis, berjualan dll, **kedua** faktor ketidak harmonisan rumah tangga, jika orang tua bercerai dan anak-anak tidak diurus dengan baik maka mereka akan mudah dihasut oleh temannya dengan turun di jalan menjadi anak jalanan. Dari dua faktor yang terjadi ini membuat anak berinisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalan (Anggara, 2016).

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan difokuskan pada unsur-unsur sinergitas menurut Slamet Mulyana (2008) Sinergitas pemerintah kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini digambarkan pada bagan di bawah ini.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan dengan beberapa indikator sinergitas menurut Slamet Mulyana (2008) yaitu Koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi

E. Deskripsi Fokus

Untuk mengetahui bagaimana sinergitas Pemerintah Kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan maka penulis menggunakan indikator dari Slamet Mulyana (2008) sebagai berikut

1. Koordinasi

Koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, sebagaimana dalam aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. Karena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan, dalam pelaksanaan koordinasi yang baik seharusnya memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil, ini tidak kalah pentingnya juga dengan unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

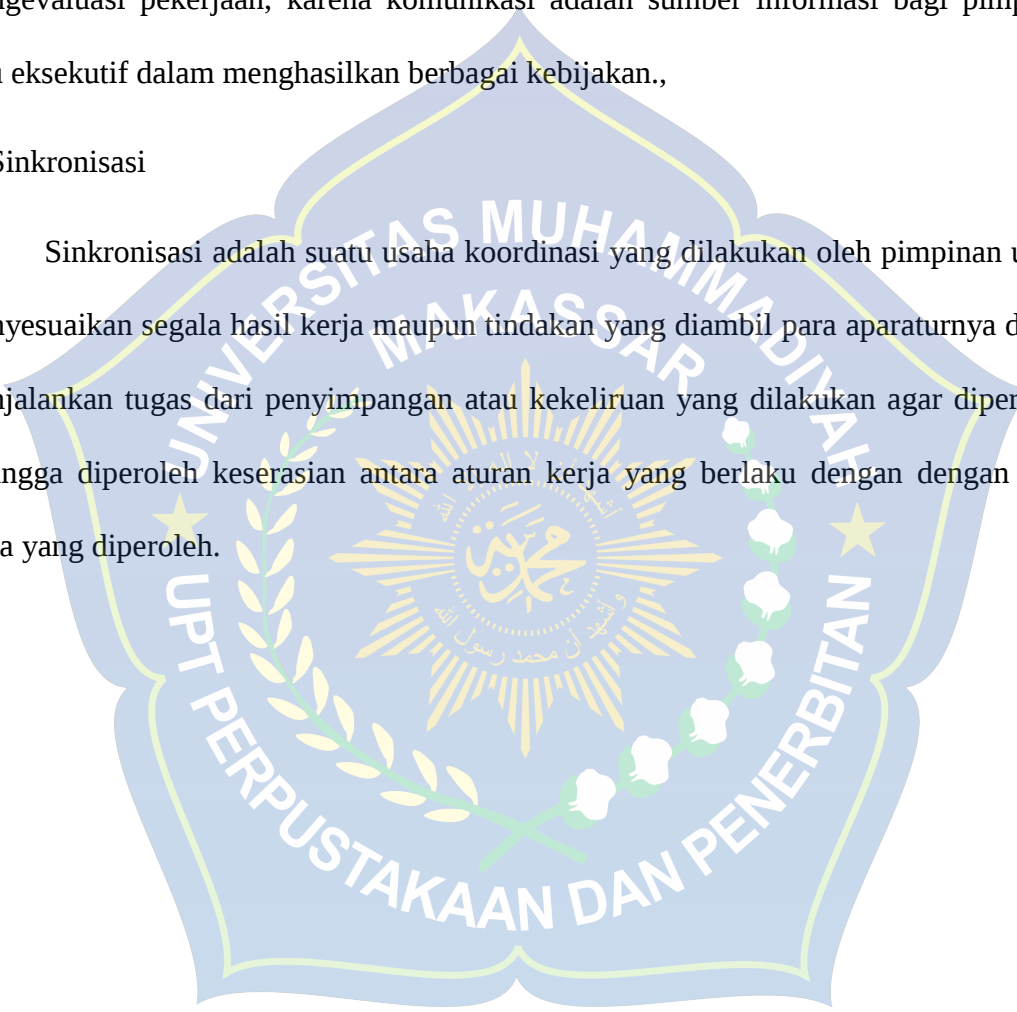
2. Komunikasi

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, maupun

tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga sulit bagi organisasi untuk mengevaluasi pekerjaan, karena komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan atau eksekutif dalam menghasilkan berbagai kebijakan.,

3. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan untuk menyesuaikan segala hasil kerja maupun tindakan yang diambil para aparaturnya dalam menjalankan tugas dari penyimpangan atau kekeliruan yang dilakukan agar diperbaiki sehingga diperoleh keserasian antara aturan kerja yang berlaku dengan dengan hasil kerja yang diperoleh.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian ini yaitu setelah dilakukan seminar proposal dan dikeluarkannya izin penelitian oleh pihak fakultas pada tanggal 02 juni 2022 – 02 agustus 2022. Penelitian ini menetapkan tempat penelitian pada kantor Dinas Sosial Kota Makassar dan kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, pertimbangan memilih lokasi tersebut karena data ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah ditempat tersebut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*. Dalam metode ini, peneliti harus bertindak menjadi instrumen kunci. Analisis datanya biasa berupa induktif ataupun deduktif kemudian hasil dari penelitian akan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada makna dari pada sebuah generalisasi (Sugiyono, 2016).

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang Sinergitas. Penelitian ini akan lebih menekankan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari kebijakan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan data yang diperoleh menjadi sumber data.

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertamanya. Dengan kata lain, data primer adalah data yang akurat yang diperoleh secara langsung melalui hasil interview kepada responden yang dijadikan sebagai subyek penelitian
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti sebagai penunjang dari data pertama. Dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku, dokumen, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian Sinergitas Pemerintah Kota Makassar dengan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Anak jalanan

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, pengambilan informan ditentukan secara *purposive sampling*. Teknik pengambilan informannya dengan mengacu pada informan yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Penulis telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Table 2 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Inisial	Asal/Jabatan	Ket.
1.	Kamil Kamaruddin, SE	KK	Kepala Seksi Pembinaan Anjal (Anak) Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar	1 Orang
2.	Sriyenty	SY	Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar	1 Orang
3.	Putri Nirwana Al Aulya. R	PN	Pekerja Sosial (PEKSOS) dari UPT Rumah perlindungan & Trauma Center (RPTC)	1 Orang
4.	Rian	RN	Anak Jalanan Kota Makassar	1 Orang
5.	Fadil	FL	Anak Jalanan Kota Makassar	1 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2016) tahapan mengumpulkan data terdiri penelitian terbatas, pengumpulan informasi (terstruktur dan tidak terstruktur) dengan cara pengamatan dan

wawancara, dokumen, materi visual, dan merancang protokol untuk pencatatan/perekaman informasi.

1. Observasi

Dengan peneliti turut andil langsung ke lapangan dengan mengamati perilaku serta aktivitas yang dilakukan individu-individu di tempat meneliti. Secara mendasar, observasi bersifat *open-ended* yang mana peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan umum kepada narasumber yang memungkinkan narasumber dapat leluasa memberikan berbagai informasi.

2. Wawancara

Peneliti dapat melakukan wawancara secara bertatap muka dengan partisipan, bisa juga dengan telepon, atau melibatkan diri dalam wawancara pada kelompok tertentu yang terdiri dari 5 (lima) sampai 7 (tujuh) peserta tiap kelompok.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental sebagai bentuk lampiran proses pengambilan data maupun untuk menginput data.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data model Miles & Huberman (1992), dalam teknik analisis ini menjelaskan tentang analisis data kualitatif

dilakukan melalui cara interaktif dan terus menerus berlangsung yang dilakukan sampai tuntas serta menyebabkan datanya menjadi jenuh (Sugiyono, 2016).

Berikut diuraikan langkah-langkah teknik analisis data tersebut.

1. *Data Reduction*

Data yang telah diperoleh yang jumlahnya bisa dikatakan banyak perlu dilakukan pencatatan yang teliti dan terperinci. Ketika peneliti melakukan penelitian yang semakin lama, datanya akan jadi lebih banyak dan kompleks serta menjadi rumit. Sehingga harus dilakukan penganalisaan data yang dinamakan dengan reduksi data. Mereduksi kata diartikan sebagai mengumpulkan dan merangkum kata yang dirasa penting lalu dicari tema yang sesuai dan pola yang tepat. Dengan demikian data yang direduksi akan menggambarkan dengan jelas tentang Sinergitas.

2. *Data Display*

Setelah data direduksi, kemudian dilakukan penyajian (*display*) data Sinergitas pemerintah kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan. Dengan melakukan penyajian data dapat mempermudah dan merencanakan sesuatu.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah selanjutnya adalah langkah analisis kualitatif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020) adalah penarikan sebuah kesimpulan dan akan dilakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh bisa dikatakan bersifat sementara dan bisa berubah jika belum didapatkan bukti-bukti yang kuat

sehingga mendukung penelitian ditahap pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya, jika kesimpulan telah diperoleh pada tahap awal dan kemudian didukung oleh beberapa bukti yang telah valid dan tetap konsisten ketika peneliti kembali untuk melakukan penelitian, sehingga kesimpulan tentang Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan yang telah diambil dikatakan kesimpulan yang dianggap kredibel.

G. Teknik Pengabsahan Data

Dalam penelitian, uji keabsahan data begitu penting dilakukan karena bertujuan untuk menentukan validitas dan reliabilitas data yang telah didapatkan pada saat Sinergitas pemerintah kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan.

Dalam penelitian ini, teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data-data tentang Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan dari semua sumber yang telah diambil oleh peneliti dengan menggunakan macam-macam cara dan berbagai waktu tertentu (Sugiyono, 2016).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu teknik yang digunakan dalam melakukan pengujian kredibilitas dengan mengecek data penelitian yang telah diperoleh dari semua sumber yang telah didapatkan oleh peneliti.

2. Triangulasi Teknik

Kedua yaitu triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data-data terhadap sumber data yang telah didapatkan peneliti dengan teknik yang

berbeda dari cara sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Salah satu yang mempengaruhi kredibilitas sebuah penelitian yaitu waktu. Pengumpulan data dengan teknik wawancara contoh pada pagi hari, narasumber masih dalam keadaan jasmani yang segar, belum terjadi banyak masalah, maka data yang dia berikan akan lebih valid dan data akan lebih kredibel. Sehingga dalam pengujian kredibilitas hasil uji tersebut menghasilkan sebuah data penelitian yang berbeda, maka peneliti harus melakukannya secara berulang-ulang untuk dapat menemukan kepastian data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Deskripsi Objek Penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kota Makassar, Gambaran Khusus lokasi penelitian yaitu Deskripsi Dinas Sosil Kota Makassar, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar serta Hasil penelitian dan Pembahasan yang di lakukan oleh penulis terkait dengan judul penelitian ini yaitu Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar (Makassar kadang dieja *Macassar*, *Mangkasar*; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung pandang atau UjungPandang) adalah sebuah kota madya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya ini adalah kota terbesar pada 5°8'S 119°25'E Koordinat: 5°8'S 119°25'E, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat,laut maupun udara dan pusat pelayanan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.

Letak : Koordinat $5^{\circ}8'S$ $119^{\circ}25'E$ di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Batas : Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkajene Kepulauan di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Pembagian Wilayah : Kota Makassar dibagi menjadi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4446 RT.

Kondisi Geografis : Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 – 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara $20^{\circ}C$ sampai dengan $32^{\circ}C$. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Lihat juga kondisi geografi Makassar selengkapnya. Luas wilayah : 128,18 km² (Total 175,77 km²). Luas wilayah kecamatan : 1 Tamalanrea : 31,84 km²; 2 Biringkanaya 48,22 km²; 3 Manggala 24,14 km²; 4 Panakkukang 17,05 km²; 5 Tallo 5,83 km²; 6 Ujung Tanah 5,94 km²; 7 Bontoala 2,10 km²; 8 Wajo 1,99 km²; 9 Ujung Pandang 2,63 km²; 10 Makassar 2,52 km²; 11 Rappocini 9,23 km²; 12 Tamalate 20,21 km²; 13 Mamajang 2,25 km²; 14 Mariso 1,82 km². Kepadatan Penduduk : 6.646,5/km² dan Jumlah penduduk : 1,168,258

jiwa. Makassar berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Makassar memiliki wilayah seluas 128,18 km². Dengan batas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Bagian Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada dipersimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai. Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur

Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis - Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

2. Deskripsi Dinas Sosial Kota Makassar

a. Profil Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983. Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu diubah lagi menjadi Kantor Departemen Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di Kabupaten/ Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Latar Belakang Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman

Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada tanah seluas 499m2, dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

b. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar

Visi dan Misi Dinas Sosial memang sudah terarah dalam tatanan kehidupan masyarakat namun tidak di jalankan dengan baik sehingga masyarakat menjadi merasakan terjerah dan terjerengit dalam mencapai kebebasan, kejayaan di setiap hidupnya dan inilah yang dirasakan oleh anak-anak yang mengais rejeki di sudut dan titik-titik tertentu di Kota Makassar sehingga akan menimbulkan berbagai banyak gejolak sosial yang tidak akan bisa di atasi dengan hanya mengandalkan program sosial seperti bantuan langsung tunai. Melihat kondisi masyarakat kurang atau sangat fementim yang notabenenya kaum tertindas, Pemerintah sangat di tungguh dalam memberikan suatu inovasi atau sebuah usaha untuk dapat mengatasi masalah yang sudah lama ada di dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat seperti dalam hal ekonomi masyarakat yang lemah, dan pada akhirnya anak-anak yang usianya masih dibilang produktif tengah di paksakan untuk mempraktekan kegiatan-kegiatan di bawah lampu merah di sudut Kota Makassar. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Visi dan misi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- Visi :

Percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang *sombere'* dan smart city dengan imunitas kota untuk kita semua

- Misi :

- 1) Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
- 2) Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.
- 3) Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang *Sombere'* dan *Smart City* untuk Semua.

c. Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar

Adapun tujuan dari Dinas Sosial Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang berpartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- 2) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan
- 3) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/ stakeholders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang

kesejahteraan sosial masyarakat.

d. Struktrul Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perlengkapan
- 3) Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- 4) Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
 - Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan pemulung
- 5) Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
 - Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial

- Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

e. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala Dinas

Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- b) Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- c) Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- d) Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan

sosial serta bimbingan organisasi sosial.

e) Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.

b) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

c) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

3) Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan pembinaan anak jalanan,

gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.

5) Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.

6) Bidang Bimbingan Organisasi Sosial Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejujuran serta kesetiakawanan.



(Sumber Dinas Sosial Kota Makassar)

3. Deskripsi Dinas Pendidikan Kota Makassar

a. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Makassar

Visi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar adalah Mewujudkan Pendidikan yang berwawasan Global, Inovatif, Berkarakter dan Relegius

- 1) Berwawasan Global yaitu menciptakan sistem pendidikan di Kota Makassar yang lebih Komprehensif dan Fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global dengan tetap mengedapankan kearifan lokal yang bercirikan :
 - a. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
 - b. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 - c. Peserta Didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan dan tanggung jawab
 - d. Lulusan pada semua jenjang Pendidikan berdaya saing global yaitu memahami perkembangan masyarakat dunia dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan
- 2) Pendidikan yang Inovatif dimaknakan bahwa pelaksanaan Pendidikan di Kota Makassar dapat melakukan pembaharuan melalui efisiensi, relevansi, kualitas dan efektivitas sesuai criteria Kebutuhan peserta didik, Masyarakat, dan pembangunan, yang dicirikan dengan:
 - a) Pemerataan dari sisi akses
 - b) Pemerataan dari sisi pelayanan

- c) Pemerataan dari sisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - d) Pemerataan dari sisi infrastruktur
 - e) Pemerataan dari sisi kualitas
 - f) Pemerataan dan pelestarian pengembangan kebudayaan
- 3) Pendidikan yang berkarakter dimaknakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar dilaksanakan melalui Kurikulum Holistik Berbasis karakter yang merupakan kurikulum terpadu yang menyentuh semua aspek kebutuhan anak, melalui
- a) Knowing the good yaitu peserta didik tidak hanya tahu tentang hal - hal yang baik, tetapi mereka harus paham mengapa melakukannya
 - b) Feeling the good yaitu membangkitkan rasa cinta peserta didik untuk melakukan hal yang baik . anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dilakukan
 - c) Good attitude yaitu peserta didik dilatih dan diberi contoh untuk berbuat mulia, sebab perbuatan yang baik itu harus dilatih dan dicontohkan
 - d) Kurikulum yang berisikan materi-materi Pendidikan antikorupsi sebagai aktualisasi dan karakter bangsa.
- 4) Pendidikan yang Religius dimaknakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar dilaksanakan melalui pendekatan :
- a) Pendidikan yang berke-Tuhanan YME (IMTAQ)
 - b) Pendidikan yang berakhlak mulia
 - c) Pendidikan yang berbudaya dengan landasan kearifan local

- d) Pendidikan yang berwawasan lingkungan
- e) Pendidikan yang memuat nilai-nilai atau kebajikan (virtue) yang menjadi dasar budaya dan karakter bangsa

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Makassar menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Menyediakan deposito Pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga prasejahtera
- 2) Menjamin kesetaraan dan ketersediaan akses layanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau
- 3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis e-learning yang menunjuk kepada perkembangan global
- 4) Meningkatkan kompetensi tenaga Pendidik untuk menjamin relevansi luaran Pendidikan dengan kebutuhan masyarakat
- 5) Menjamin keterlaksanaan Program Pendidikan Universal dan program Pendidikan orang dewasa (melek huruf)
- 6) Menjamin keterlaksanaan kurikulum yang holistic berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral dan karakter bangsa
- 7) Mewujudkan kelestarian dan memperkuat Kebudayaan local
- 8) Menjamin penyelenggaraan Pendidikan yang transparan dan akuntabel.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Makassar

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan organisasi perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar

disebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Makassar adalah merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pendidikan, meliputi pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal 12 Perda Nomor 3 Tahun 2009, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.
- 2) Penyusunan rencana dan program di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.
- 3) Pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.
- 4) Pemberian perizinan dan layanan umum di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.
- 5) Pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya.

- 6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- 7) Pembinaan unit pelaksana teknis

B. Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah telah lama mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan daerah.

Terkhusus di Kota Makassar pemerintah membuat sebuah peraturan yang berlandaskan UUD 1945 ayat 1 untuk menyikapi mengenai Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar yang di tuangkan dalam peraturan daerah No 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. yang membuat pemerintah terkhusus Dinas Sosial menghasilkan beberapa program pembinaan, rehabilitasi dan pengalokasian Anak jalanan yang di lakukan oleh Pekerja Sosial (PEKSOS) UPT rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) sebagai fungsinya di bawah Koordinasi Dinas Sosial Kota Makassar.

Gambar 2. Tujuan pembinaan anak jalanan



(Sumber Dinas Sosial Kota Makassar)

Sebagaimana dengan Data Sekunder di Atas (Gambar 2. Tujuan dari Pembinaan Anak jalanan) sebagaimana Dinas Sosial untuk membina dan memberdayakan anak jalanan yaitu memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban masyarakat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga Negara, menjaga sifat-Sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat, menciptakan perlakuan yang adil dan proposioanal dan bermasyarakat, Miningkatkan ketertiban dalam maysrakat melalui kepastian hukum, Dan mewujudkan kesiimbangan keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan masyarakat.

Selain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga Adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dan terlibat persoalan pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar dari segala aspek terkhusus di bidang

pendidikan yang menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi angka anak jalanan yang ada di kota Makassar, Sebagaimana yang di sampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan mengatakan :

“Sebenarnya peran Dinas Pendidikan adalah bagaimana anak-anak putus sekolah (anak jalanan) tersebut memperoleh layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan pendidikan anak. Namun Dinas Pendidikan belum memiliki data akurat mengenai apakah anak putus sekolah tersebut adalah anak jalanan atau hanya putus sekolah. (Hasil Wawancara Penulis Kepada SY, 23 Juni 2022)

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu perlunya ada sinergitas berlandaskan kendala yang telah di sebutkan di antara sebuah instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan tugas dan fungsinya untuk memberdayakan anak jalanan secara efektif. Hal tersebut sesuai dengan yang apa yang di gambarkan oleh Covey (2004). Melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama dengan hasil yang lebih efektif, melakukan kerjasama dalam pengambilan keputusan maka hasil kerja sama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing Instansi/Organisasi saat bekerja secara sendiri. Berdasarkan dengan hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan menegaskan bahwa anak jalanan yang putus sekolah di Kota Makassar adalah bentuk tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan di bidang pendidikan.

Berikut Data Anak jalanan yang telah terdata dan telah di bina oleh Rumah Perlindungan & Trauma Center

Tabel. 3 Data Anak Jalanan Tahun 2022

NO	NAMA	SEKOLAH	KET
1	PANGERAN ALIF	KELAS 2 SMP	PUTUS SEKOLAH
2	MUH.ADNAN RAMADHAN	TAMAT SD	TIDAK LANJUT SMP
3	ADAM	TAMAT SD	TIDAK LANJUT SMP
4	MUH.ILHAM SAPUTRA	KELAS 2 SD	PUTUS SEKOLAH
5	MUH AKBAR	KELAS 2 SMP APPI	PUTUS SEKOLAH
6	MARSAH	KELAS 2 SD	PUTUS SEKOLAH
7	MUH.RESKY	KELAS 3 SD DARUL HIKMAH	PUTUS SEKOLAH
8	TRI HANA PUTRI	KELAS 4 SD BONTO MANAI	PUTUS SEKOLAH
9	AFDAL RAMADHAN	KELAS 5 SD TAMAMAUNG	PUTUS SEKOLAH
10	ALDI AFRIADI	KELAS 4 SD TAMAMAUNG	PUTUS SEKOLAH
11	PUTRA	KELAS 2 SD KANDEA	PUTUS SEKOLAH
12	FIRMAN	KELAS 3 SD TAMAMAUNG 4	PUTUS SEKOLAH
13	WILDA EFENDI	KELAS 8 SMP 12	PUTUS SEKOLAH
14	ASTY ANANDA	KELAS 6 SD.INP. LAYANG TUA 2	PUTUS SEKOLAH
15	ARMAN	KELAS 5 SD TAMAMAUNG	PUTUS SEKOLAH
16	ANDRIANI	TAMAT SD	TIDAK LANJUT SMP

(Sumber ; RPTC Kota Makassar)

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 16 anak jalanan yang telah terdata dan telah mendapatkan binaan dari RPTC dari tahap sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama. Dari angka tersebut masih terbilang kurang dari jumlah anak jalanan yang terdata oleh Dinas Sosial Kota Makassar, maka dari itu perlunya sinergitas antar Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dalam bersinergi untuk memberdayakan anak jalanan putus sekolah di Kota Makassar.

Hal di atas di benarkan oleh Dinas pendidikan yang telah di wawancarai oleh penulis yang menyatakan

“Setelah data yang kami terima oleh pihak RPTC itu kami tindak lanjuti, dari tingkatan Sekolah yang mendekati kelulusan kami berikan pelayanan paket A untuk sekolah Dasar dan Paket B untuk Sekolah Menengah Pertama, Adapun pembinaan berupa rekomendasi untuk melanjutkan sekolah bagi anak jalanan yang masih belum sampai tingkatan kelas yang menjadi persyaratan kelulusan.”
”(Hasil Wawancara Penulis Kepada SY, 23 Juni 2022).

Berkaitan dengan sinergi pemerintah kota Makassar, Kepala seksi penanggung jawab anak jalanan Dinas Sosial Kota Makassar menjelaskan sinergi antara dinas Sosial dan Dinas Pendidikan meliputi:

“Anak jalanan yang terdata oleh Dinas Sosial dengan kebutuhan-kebutuhan dan yang layak mendapatkan pendidikan kami fasilitasi/penuhi, dan kami berikan ke Dinas pendidikan Kota Makassar sesuai kriteria yang di tentukan sesuai dengan kewenangannya, adapun dalam memberdayakan secara mandiri anak jalan itu pihak dinas sosial akan menyusun program inovasi pembagunan rumah singgah untuk pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar ”(Hasil Wawancara Penulis Kepada KK, 6 Juni 2022).

Hal yang berbeda di sampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar tentang sinergi antar Dinas Sosial untuk anak jalanan yaitu:

“Sinergi yang berhubungan dengan pekerja sosial (PEKSOS) atau dinas sosial tentang anak jalanan yang putus sekolah tetap di layani, Namun Dinas Pendidikan belum menerima data akurat dari komunikasi yang di lakukan, bahwa data tersebut adalah anak jalan yang putus sekolah atau hanya masyarakat yg putus sekolah karena beberapa alasan ”(Hasil Wawancara Penulis Kepada (SY), 23 Juni 2022).

Gambar 3. Data hasil anak jalanan



Dari apa yang disampaikan oleh Narasumber yang telah dimintai keterangan yang berkaitan dengan Sinergitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan anak jalanan putus sekolah di Kota Makassar maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah kota Makassar yaitu Dinas Sosial telah bersinergi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemberdayaan di bidang pendidikan Anak jalan Kota Makassar.

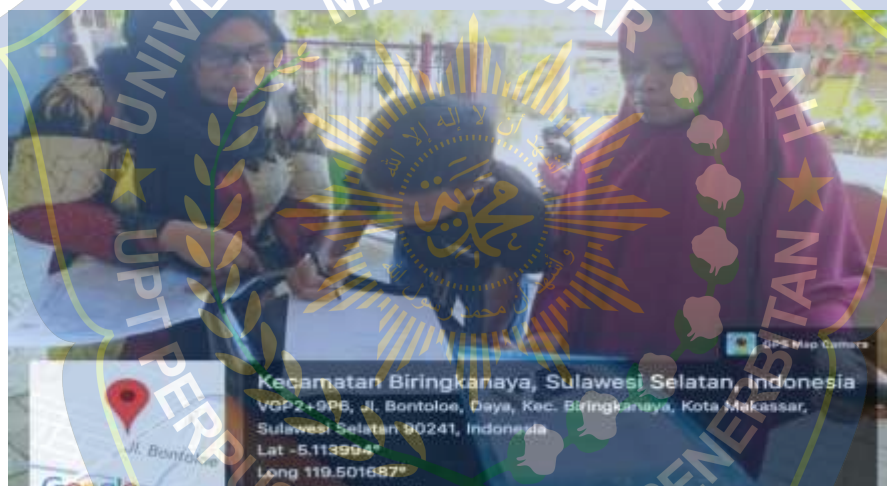
Dengan bentuk pemberdayaan yang dilakukan tahap kerja sama yang dilakukan meliputi anak jalanan (putus sekolah) yang perlu layanan fasilitas pendidikan berasal dari pendataan dinas Sosial kemudian di berikan ke Dinas pendidikan. Dinas Sosial juga melakukan pembinaan di segala aspek, seperti kesehatan, pendataan sipil, dan pembinaan-pembinaan lainnya yang di butuhkan oleh anak jalanan yang telah di temukan.

Adapun bentuk pemberdayaan atau binaan yang dilakukan Dinas pendidikan

sejauh ini yaitu melakukan layanan pendidikan sesuai kebutuhan, baik itu kebutuhan administrasi masuk sekolah, beasiswa tidak mampu, memberdayakan secara mandiri anak jalan itu pihak Dinas Sosial akan menyusun program inovasi Pembangunan Rumah Singgah dan layanan pendidikan lainnya sesuai kebutuhan anak jalan yang di terima.

“ Anak putus sekolah yang telah didata selanjutnya dilakukan home visit oleh dinas pendidikan, jika ada yang administrasinya kurang untuk masuk sekolah maka akan dibantu, kita juga melakukan survey terhadap ekonomi anak tersebut jika memang berasal dari keluarga berekonomi lemah kami buat rekomendasi beasiswa tidak mampu” (Hasil Wawancara Penulis Kepada (SY), 23 Juni 2022).

Gambar 4. Home visit & Pendataan oleh Dinas pendidikan



(Sumber dari Dinas Pendidikan Kota Makassar)

Namun untuk mengukur suatu keberhasilan sinergi antar kedua instansi masih kurang maksimal akibat persoalan pendataan yang belum akurat/jelas mengenai kriteria anak jalanan di terima Dinas Pendidikan Kota Makassar, sinergi yang harusnya menghasilkan energi atau kekuatan yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang diinginkan dan melebihi jumlah yang ingin di capai.

C. Bentuk Koordinasi, Komunikasi, Sinkronisasi Dari Sinergitas Dinas Sosial Dan Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan

1. Koordinasi

Koordinasi pemerintah daerah menurut penjelasan secara resmi dari pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, sebagaimana dalam aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. Karena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan, dalam pelaksanaan koordinasi yang baik seharusnya memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil, ini tidak kalah pentingnya juga dengan unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Stooner dalam Ni'matin (2013:17) mengatakan koordinasi merupakan aktifitas dan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerja sama yang selaras dan tertib mengarah kepada tercapainya tujuan koordinasi secara menyeluruh, jika koordinasi berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi semerautan, kekacauan, tumpang tindih atau kekosongan kerja serta unsur-unsurnya terdiri dari: perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan. Dalam hal ini penulis ingin menumakan apa saja yang menjadi koordinasi yang di lakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menangani anak jalanan yang telah putus sekolah agar dapat mendapatkan pendidikan yang semestinya.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan anak jalanan di Kota Makassar sebagai berikut:

“Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar seperti menindak lanjuti setiap kinerja yang dilakukan oleh peksos(pekerja sosial) yang telah dibangun di RTC. jika ada anak jalanan yang membutuhkan layanan kesehatan atau pendidikan itu kami akan membuat surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan untuk dikirim ke SKPD se-Kota Makassar yang terkait dengan layanan yang dibutuhkan oleh anak jalanan tersebut.”(Hasil Wawancara Penulis Kepada KK, 6 Juni 2022).

Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja. Dalam hal ini tujuan bersama harus difokuskan pada instansi yang terlibat antara Pemerintah Daerah

Menangani kasus anak jalanan di kota Makassar menurut keterangan yang dikatakan oleh dinas Sosial Kota Makassar, Dinas Sosial melakukan pantauan yang intens kepada para pekerja sosial yang ada di UPT rumah perlindungan dan trauma center (RPTC). UPT rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) adalah sebuah RPTC merupakan Lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan dan anak terlantar di jalanan sebelum dirujuk ke lembaga lain yang diperkirakan mampu memberikan pelayanan lebih memadai. Sebagai pusat trauma (trauma center), RPTC memberikan layanan peredaman (penurunan atau penghilangan) kondisi traumatis yang dialami

korban atau keluarganya sebagai akibat dari tindak kekerasan. Penanganan yang dilakukan membutuhkan strategi yang komprehensif dan mendasar. Oleh karena itu, RPTC bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain keluarga korban, RT/RW, PKT/RS, Polri, instansi sosial, instansi tenaga kerja dan transmigrasi, institusi hukum, pendidikan, dan pers/media untuk mendukung berjalannya program yang langsung di naungi oleh dinas Sosial Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan apa yang di katakan oleh pekerja sosial yang telah di wawancarai penulis yang menyatakan:

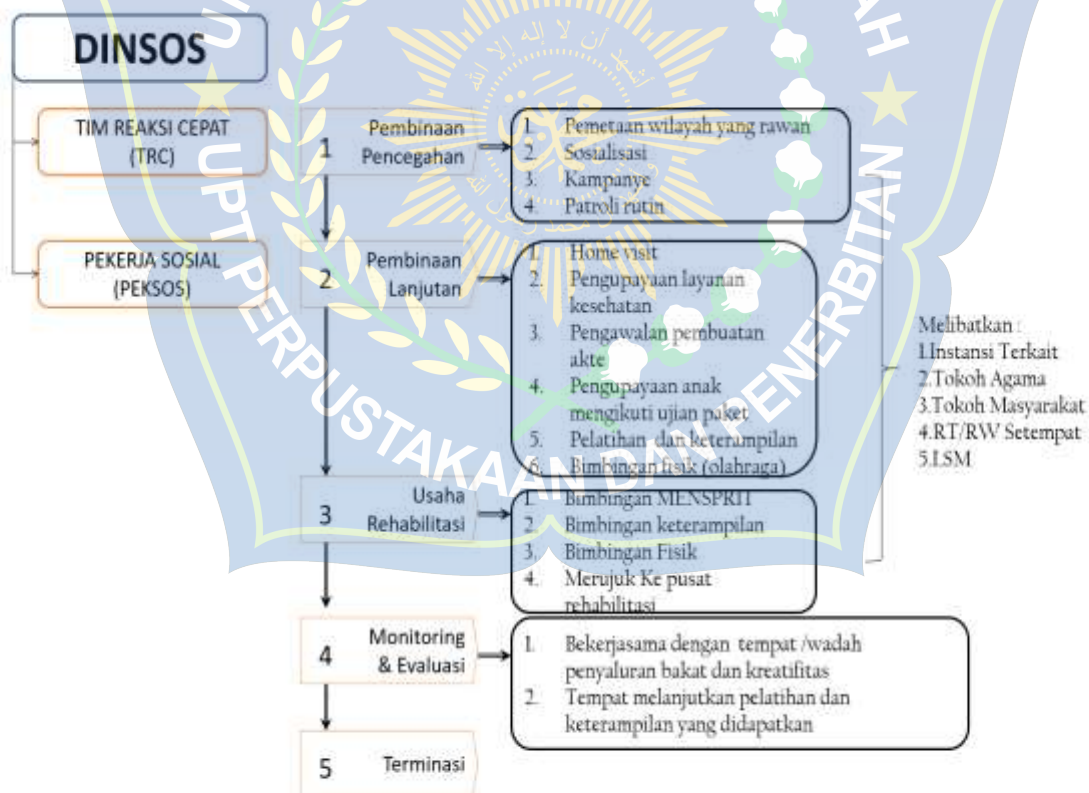
“Sebelumnya kami menerima hasil penjakau tim TRC dari Dinas Sosial mengenai anak jalanan,gepeng, lansia atau tindak kekerasan kemudian hasil penjakau dari Dinas sosial kami bawa ke sisi di rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) dan kemudian di bina. (Hasil Wawancara Kepada Informan PN ,27 Juni 2022).

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Dari data yang di kumpulkan oleh penulis terhadap Dinas sosial dan pekerja sosial yang ada di RPTC mengenai Koordinasi yang terjadi yang berkaitan tentang anak jalanan itu sudah jelas terjadi karena ketertaikan tugas dan fungsi mereka, Koordinasi yang di temukan berupa Tim TRC yang di bentuk oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk menangani Anak jalanan, pengemis di Kota Makassar yaitu hasil dari kinerja tim tersebut di berikan kepada pekerja sosial yang ada di Rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) Kota Makassar. Berbeda dengan koordinasi yang di lakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar yang mengatakan:

“Koordinasi yang di lakukan masih bersifat personal, belum ada semacam lintas OPD untuk penanganan dan pemberdayaan anak jalanan yang putus sekolah. Yang jelas bahwa setiap data yang di berikan oleh Dinas Sosial kepada dinas Pendidikan, akan di fasilitasi untuk meperoleh layanan pendidikan”(Hasil Wawancara Penulis Kepada (SY), 23 Juni 2022).

Menurut Dinas Sosial Kota Makassar koordinasi yang di lakukan kepada Instansi pemerintah terkhusus Dinas Sosial Kota Makassar terkait anak jalanan yang membutuhkan layanan pendidikan itu koordinasinya masih bersifat personal, dan belum ada semacam gambaran teknis yang strategis di susun khusus untuk kasus pembinaan pelayanan pendidikan untuk anak jalanan di kota Makassar.

Gambar 5. Koordinasi Dinas Sosial Dalam penangan Anak Jalanan Kota Makassar



(Sumber Dinas Sosial Kota Makassar)

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis terhadap beberapa informan yang telah di wawancarai, penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam memberdayakan atau membina anak jalanan di kota Makassar itu masih belum efektif. Sesuai dengan apa hasil yang di temukan bahwa koordinasinya masih bersifat Personal, dan belum ada semacam gambaran teknis yang strategis yang susun khusus untuk kasus pembinaan pelayanan pendidikan untuk anak jalanan di kota Makassar. Gambaran koordiansi yang di lakukan oleh pemerintah kota Makassar berupa Dinas sosial membentuk sebuah tim TRC untuk menganani anak jalan, dan kemudian mengrim hasil kinerja tim tersebut kepada PEKSOS (Pekerja Sosial) yang ada di Rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) untuk tindak lanjut pembinaan, adapun anak jalanan putus sekolah yang membutuhkan layanan pendidikan di buatkan rekomendasi ke pada Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk di tindak lanjuti.

2. Komunikasi

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, maupun tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga sulit bagi organisasi untuk mengevaluasi pekerjaan, karena komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan atau eksekutif dalam menghasilkan berbagai kebijakan.

Aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja, pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja dan kerja sama yang baik antar individu dan antar unit organisasi atau departemen, mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit organisasi, mengurangi aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustrasi, dan mendorong semangat kerja (Gondokusumo, 1980 : 2).

Dalam Kasus menangani Anak Jalan di Kota Makassar tentunya ada beberapa organisasi pemerintahan yang berkaitan tentang hal tersebut. Tentunya untuk dapat mengetahui bagaimanana anak jalanan di Kota Makassar dapat di berdayakan dan di bina maka organisasi pemerintah memerlukan komunikasi baik itu internal maupun eksternal untuk tujuan di atas dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan anak jalanan di Kota Makassar sebagai berikut:

“Mengenai komunikasi untuk anak jalanan Dinas Sosial sesuai dengan aturan kesejahteraan Sosial ada beberapa, yaitu PMKS (pemeruk layanan kesejahteraan Sosial) yang memiliki 26 jenis kriteria termasuk di dalamnya anak jalanan dan Tim Teknis Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), unit Pekerja Sosial yang bekerja langsung di lapangan menyangkut anak jalan. ”(Hasil Wawancara Penulis Kepada Informan KK, 6 Juni 2022)

Dalam hubungan kerja pemerintahan dikenal adanya komunikasi informasi dan komunikasi hubungan kerja. Komunikasi informasi biasanya disampaikan oleh pimpinan kepada unit-unit kerja di bawahnya melalui kegiatan apel kerja atau dalam suasana rapat. sedangkan komunikasi hubungan kerja adalah suatu cara dalam

menyampaikan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan tersebut dapat berhasil, secara efisien dan efektif. Berdasarkan apa yang di sampaikan oleh inforan dari Dinas Sosial bahwa Dinas Sosial Kota Makassar memiliki beberapa tim yang di susun dan saling berkomunikasi mengenai anak jalanan di kota Makassar sesuai dengan aturan kesejahteraan Sosial, hal ini dapat termasuk dalam komunikasi informasi yang di kepalai langsung oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan unit-unti yang di bentuk.

Hal Lain di katakana oleh Peksos (Pekerja Sosial) tentang komunikasi terkait anak jalanan di kota Makassar sebagai berikut:

“Dari data yang kami dapatkan dari Dinas Sosial mengenai tempat tinggal anak jalanan yang di temukann, NIK, RT/RW, Kecamatan Dsb. Yang sudah memliki BNBA di bina selama 3 hari di RPTC, kemudian kami kembalikan lagi ke dinas Sosial untuk menyurati Dinas pendidikan dengan Lampiran anak jalanan yang putus sekolah ”(Hasil Wawancara Penulis Kepada Informan PN, 27 Juni 2022).

Dari apa yang di sampaikan oleh pekerja Sosial terkait Komunikasi mengatakan bahwa adanya komunikasi vertikal yang di lakukan oleh pekerja sosial sebagai unit dan Dinas sosial, pembinaan anak jalan di rptc rehabilats, kemudian anak jalanan yang anak jalanan di kirim ke Dinas sosial untuk di berdayakan. terkhusus untuk anak jalanan yang putus sekolah akan di buatn rekomendasi ke Dinas Pendidikan dengan melampirkan kepastian anak jalanan yang mebutuhkan layanan pendidikan.

Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan Oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar yang mengatakan:

“Adanya Komunikasi yang di lakukan Dinas Pendidikan pada saat ada data yang di terima. komunkasi jenis interpersonal yang terjadi” (Hasil

Wawancara Penulis Kepada Informan SY, 23 Juni 2022)

Komunikasi interpersonal yang di maksud jenis komunikasi antar organisasi yang keduanya memiliki keterkaitan tertentu. Keterkaitan yang terjadi di antaranya adanya anak jalanan putus sekolah di bawah binaan Dinas Sosial Kota Makassar dan melakukan komunikasi pemerintahan bersifat hubungan kerja kepada Dinas Pendidikan sebagai penyedia layanan pendidikan di Kota Makassar.

Dari apa yang di sampaikan oleh Narasumber yang telah di mintai keterangan yang berkaitan dengan Komunikasi Antar Dinas Sosial dan Pendidikan dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar maka penulis menyimpulkan bahwa Adanya Komunikasi yang terjadi dalam pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan di kota Makassar sudah berjalan dengan baik. Dinas Sosial dalam membentuk sebuah unit pelaksana anak jalan di kota Makassar menjadi mudahnya komunikasi antar Dinas Sosial dan yang berkerja di lapangan. Dinas Pendidikan yang tergolong organisasi atau Instansi daerah yang sama dengan Dinas Sosial memudahkan adanya komunikasi yang terjadi terkait anak jalanan putus sekolah di Kota Makassar.

3. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan untuk menyesuaikan segala hasil kerja maupun tindakan yang diambil para aparaturnya dalam menjalankan tugas dari penyimpangan atau kekeliruan yang dilakukan agar diperbaiki sehingga diperoleh keserasian antara aturan kerja yang berlaku dengan dengan hasil kerja yang diperoleh. Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti

dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhannya itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama (Syafiie, 2005).

Mengetahui Sinkronisasi antar organisasi yang ada dalam pemberdayaan anak jalanan tentu setiap organisasi harus mengetahui sebab dari terjadinya sebuah problem yang terus menerus berulang walaupun organisasi di dalam Pemerintahan telah melakukan tindak lanjut untuk memberdayakan anak jalanan di Kota Makassar.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara terhadap salah satu anak jalanan yang di temui di lapangan.

“Alasan turun kejalanan karena melihat teman-teman yang lain dapat makanan sehari dan berhenti sekolah untuk mencari uang, saya pun terpaksa mengikutinya” (Hasil Wawancara Penulis Kepada Informan RN, 27 Juni 2022).

Hal yang sama juga di katakana oleh anak jalanan lainnya yang mengatakan:

“Alasan turun ke jalan untuk ngamen dan mengemis karena mau membantu orang tua, atas kemauan sendiri, sudah sering di raziah oleh tim TRC tapi tetap mau turun ke jalan.” (Hasil Wawancara Penulis Kepada Informan FL, 27 Juni 2022)

Seperti yang telah di katakana oleh kedua anak jalanan faktor yang melatar belakangi mereka untuk turun ke jalan yaitu faktor ekonomi. Selain itu banyak permasalahan yang dialami oleh anak jalanan, diantaranya adalah tidak memiliki tempat untuk tinggal, terluntang-lantung di jalanan, putus sekolah bahkan terjadi kekerasan pada anak. Anak jalanan perlu menjadi masalah serius sehingga diperlukan sinergitas yang baik oleh pemerintah. Pentingnya koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi oleh

Pemerintah dan Stakeholder agar terwujud sinergitas yang lebih baik.

Berkaitan dengan Bentuk Sinkronasi Pemerintah kota Makassar, Kepala Seksi Penanggung jawab anak jalanan Dinas sosial Kota Makassar menjelaskan bentuk Sinkronisasi dinas Sosial dan Dinas Pendidikan meliputi:

“Ini sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melayani anak jalanan yang membutuhkan pendidikan untuk di layani secara gratis” (Hasil Wawancara Penulis Kepada KK, 6 Juni 2022).

Keserasian antara aturan kerja yang berlaku dengan dengan hasil kerja yang di peroleh untuk anak jalanan putus sekolah yang membutuhkan pendidikan sudah tertuang dalam Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan. Hal yang menjadi acuan pemerintah dalam membina anak jalanan juga di Kota Makassar juga tertuang dalam peraturan daerah No 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan di Kota Makassar baik itu dari Dinas pendidikan memiliki keselarasan tanggung jawab kepada anak jalanan yang putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sinkronasi Dinas Pendidikan dalam hal ini di benarkan oleh salah satu narasumber dari Dinas Pendidikan yang mengatakan:

“Dinas Pendidikan memiliki Visi, dan Misi yang jelas, menyangkut sinkronisasi antar dinas sosial itu data yang di berikan masih belum jelas tentang anak jalanan yang putus sekolah yang di utamakan untuk layanan pendidikan dengan anak jalana yang putus sekolah di sebabkan faktor yang di luar konteks dari wewenang dinas Pendidikan” (Hasil Wawancara Penulis Kepada (SY), 23 Juni 2022)

Dari apa yang di sampaikan oleh narasumber yang telah di mintai keterangan yang berkaitan dengan sinergitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar maka penulis menyimpulkan bahwa bentuk sinkronisasi yang terjadi antar Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Makassar yaitu adanya keserasian antara aturan kerja yang berlaku dengan dengan hasil kerja yang di peroleh untuk anak jalanan putus sekolah yang di berdayakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar melalui kerja sama kepada Dinas Pendidikan untuk pemberian fasilitas dan layanan pendidikan untuk anak jalanan yang putus sekolah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka Penulis dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi yang di lakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam memberdayakan atau membina anak jalanan di kota Makassar itu masih bersifat Personal, dan belum ada semacam gambaran teknis yang strategis yang disusun khusus untuk kasus pembinaan pelayanan pendidikan untuk anak jalanan di kota Makassa. Gambaran kordinansi yang di lakukan oleh pemerintah kota Makassar berupa Dinas sosial membentuk sebuah tim TRC untuk menganani anak jalan, dan kemudian mengirim hasil kinerja tim tersebut kepada Peksos (Pekerja Sosial) yang ada di Rumah Perlindungan Dan Trauma Center (RPTC) untuk tindak lanjut pembinaan, adapun anak jalanan putus sekolah yang membutuhkan layanan pendidikan di buatkan rekomendasi ke pada Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk di tindak lanjuti
2. Adanya komunikasi yang terjadi dalam pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan di kota Makassar sudah berjalan dengan baik. Dinas Sosial dalam membentuk sebuah unit pelaksana anak jalan di kota Makassar menjadi mudahnya komunikasi antar Dinas Sosial dan yang berkerja di lapangan.

Dinas Pendidikan yang tergolong organisasi atau Instansi daerah yang sama dengan Dinas Sosial memudahkan adanya komunikasi yang terjadi terkait anak jalanan putus sekolah di Kota Makassar.

3. Adanya bentuk Sinkronisasi keserasian antara aturan kerja yang berlaku dengan dengan hasil kerja yang di peroleh untuk anak jalanan putus sekolah yang di berdayakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar melalui kerja sama kepada Dinas Pendidikan untuk pemberian fasilitas dan layanan pendidikan untuk anak jalanan yang putus sekolah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terkait sinergitas pemerintah Kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Peningkatan sinergitas antar pemerintah daerah yang lebih baik di tingkatkan dengan di bentuknya aturan atau regulasi, dalam memberdayakan anak jalanan di Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah Kota Makassar yakni Dinas Sosial harusnya dapat memperbaiki melakukan pendataan anak jalanan yang lebih akurat/jelas mengenai kriteria anak jalanan putus sekolah sehingga sinergitas antar instansi lainnya dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. LPFE Universitas Indonesia.
- Almira,R (2017). *Pemberdayaan anak jalanan di kota Surabaya (sinergitas antar stakeholders dalam peningkatan kemandirian anak jalanan)*. Universitas Airlangga
- Anggara, O. F. (2016). *Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psylylogical Well Being pada Anak Jalanan di Jaringan XYZ*. 17–40.
- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 31–40.
- Covey, S. (2004). *The 7 Habits of Highly Effective People (Cetakan Ke-15)*. Binarupa Aksara.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (ke-4)*. Pustaka Pelajar.
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia*. BPFE.
- Hasibuan, Malayu, S.P. (2009) “Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah”. Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES.
- Lina,N.(2011). *Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Malang Melalui Kemitraan Antara Pemerintah Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Griya Baca Kota Malang)* Universitas Brawijaya
- Maulidar, S. (2019). *Sinergitas Kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh.
- Maryani, Dedeh and Nainggolan, Ruth Roselin E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*.
- McArdle, J. (1989). *Community Development Tools of Trade. Community Quarterly*

Journal, 16, 47–54.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Muslim, M. (2013). Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.26>
- Nuridin, A. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar*.
- Prajono, & Pranarka. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS.
- Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/ Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15, 121–148.
- Ronawati, A. (2011). Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar. *Sosiokonsepsia*, 16(02), 175–186.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2003). *Corporate Finance 7th Edition*. McGraw-Hill.
- Sabarisman, M. (2015). *Peluang dan tantangan pelayanan kesejahteraan sosial Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur*.
- Sakman. (2008). Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan , Gelandangan , Pengemis , dan Pengamen di Kota Makassar). *Jurnal Supremasi*, 3, 201–221.
- Slamet Mulyana. *sinergitas dan kemitraan perencanaan program kesehatan di jawa barat*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (23rd ed.)*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publikasihing

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran I. SOP Penertiban Anak Jalanan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Sakti Peksos & Staf	Kepala UPTD	Kepala Dinas / Sekretaris	Masyarakat, Polisi dan LSM	Panti/Keluarga	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima laporan PMKS dari masyarakat				Mulai		Kritea PMKS (Anak Terlantar, Gelandangan dan Lansia Terlantar)	1 Jam	Laporan PMKS
2	Melakukan Pendataan dan assesment terhadap hasil Penertiban TIM TRC Soribattang						Daftar Pendataan yang telah terjaring razia	2-3 Jam	Mendapatkan klien untuk ditempatkan pada shelter sementara Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)
3	Melakukan rujukan untuk tindak lanjut						Mengetahui kondisi klien berdasarkan hasil assesment	1 Jam	Rujukan diberikan kepada PMKS untuk tindak lanjut, apakah akan dikembalikan ke orang tua atau panti rehabilitasi
4	Melakukan pembinaan di Rumah Perlindungan Trauam Center(RPTC)						Pembinaan dilaksanakan selama 3 hari	3 Hari	PMKS mendapatkan tambahan pengetahuan
5	Monitoring dan Evaluasi						Kegiatan pembinaan	1 Hari	Evaluasi dilakukan
6	Melakukan pendampingan terhadap PMKS						Hasil Rujukan	6-12 Bulan	PMKS yang mendapatkan pendampingan

Tahun 2021

Data
Hasil Patroli PMKS Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen
Yang Terjaring Selama 01 Januari - 31 Desember 2021

No.	Klasifikasi PMKS	Jenis Kelamin		BULAN												Total
		L	P	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Anjal	183	93	-	-	-	12	36	35	-	-	45	87	27	34	276
2	Gepeng	79	114	-	-	-	4	11	15	-	-	46	77	25	15	193
3	Pengamen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4
4	Obat-Obatan/serm	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
Jumlah		273	207	0	0	0	16	47	57	0	0	92	165	53	50	480

Data
Hasil Patroli PMKS Anak Jalanan, Gepeug dan Pengamen
Yang Terjaring Selama 01 Januari - 31 Desember 2021

Saribattang

BERMUKA PELUANG
BUDAYA UNGG

No.	Klasifikasi PMKS	Jenis Kelamin		BULAN											Total	
		L	P	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Anjak	183	93	-	-	-	12	36	35	-	-	45	87	27	34	276

Tahun 2019





Data
Hasil Patroli PMKS Anak Jalanan
Yang Terjaring Selama 01 Januari - 31 Desember 2019


Saribattang
KEP. MORA PELUANG BUKAN UANG

No.	Klasifikasi PMKS	Jenis Kelamin		BULAN												Total
		L	P	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Anak	129	52	5	18	24	12	21	10	34	8	9	22	12	16	191
2																
3																
4																
Jumlah		129	52	5	18	24	12	21	10	34	8	9	22	12	16	191

Lampiran III. Dokumentasi Wawancara



(Gambar No 1, Wawancara Penulis terhadap Narasumber KK sebagai Kepala Seksi Pembinaan Anjal (Anak) Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar Dinas Sosial)



(Gambar no 2, Wawancara Penulis terhadap Narasumber SY Sebagai Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar)



(Gambar no 3, Wawancara Penulis terhadap Narasumber PN sebagai pekerja Sosial (PEKSOS) dari UPT Rumah perlindungan & dan Trauma Center (RPTC)



(Gambar no 4 Wawancara Penulis terhadap Narasumber RN dan FL sebagai Anak Jalanan Putus sekolah Kota Makassar yang berhasil di wawancara)

Lampiran IV. Surat Izin Penelitian

 **Universitas Muhammadiyah Makassar**
Jalan Pahlawan - Padmasari - Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Menara Iqbal Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 239 Makassar 90231
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
E-mail: fkip@unismuh.ac.id
Official Web: <https://unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0824/FSP/A.1-VIII/V/1443 H/2022 M
Lamp. : 1 (satu) Eksampul
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Fitriani Amir
Stambuk : 105611118218
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar
Judul Skripsi : "Sinergitas Pemerintah Kota Makassar dalam Pemberdayaan Anak Jalanan"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullah, Khaerun Katziran
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 27 Mei 2022

Dekan,

Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 790.727



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sudar Alauddin No. 290 Telp. 8609712 Fax. (0411) 865388 Makassar 90221 E-mail: dpl@unismuhmakassar.ac.id



Nomor : 1892/05/C.4-VIII/V/40/2022

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0824/FSP/A.1-VIII/V/1443 H/2022M tanggal 30 Mei 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **FITRIANI AMIR**

No. Stambuk : **10561 11182 18**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Juni 2022 s/d 2 Agustus 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 03 Juni 2022

K e p a d a

**Yth. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR**

**DI -
MAKASSAR**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/163 -II/BKBP/VI/2022

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan

1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2060/S.01/PTSP/2022 Tanggal 02 Juni 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **FITRIANI AMIR**
NIM / Jurusan : **105611118218 / Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1) / UNISMUH**
Tanggal pelaksanaan : **03 Juni s/d 02 Agustus 2022**
Jenis Penelitian : **Skripsi**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin No.259, Makassar**
Judul : **"SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR

KEPALA BADAN KESBANGPOL

q.b.

SEKERTARIS,

CI DAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

DR. HARI, S.I.P., S.H., M.H., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b

NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 22 Juni 2022

Kepada

Yth. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

**SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/373-UBKBP/VI/2022**

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3582/S.01/PTSP/2022 Tanggal 21 Juni 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : FITRIANI AMIR
NIM / Jurusan : 105611118218 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Tanggal pelaksanaan : 22 Juni s/d 22 Juli 2022
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
Judul : "SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN"

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibenarkan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.



DR. HARI S.P., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat IV/b
19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Set. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Set di Makassar;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran V. Surat telah melakukan penelitian

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
DINAS SOSIAL
Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313
Website : www.dinsos.makassarkota.go.id Email : dinsos@makasarkota.go.id

Makassar, 17 Juni 2022

Nomor : 070/ 569/Dinsos/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada
Yth. Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di
Makassar

Dengan Hormat,
Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/1163-II/BKBP/V/2022, Tentang Surat Izin Penelitian, Tanggal 03 Juni 2022. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : FITRIANI AMIR
Nim/Jurusan : 105611118218 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Unismuh
Tanggal Pelaksanaan : 03 Juni s/d 17 Juni 2022
Jenis Penelitian : Skripsi
Judul : "SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN".

Telah disetujui untuk melakukan Penelitian pada Instansi/Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul diatas, yang dilaksanakan mulai tanggal 03 Juni s/d 17 Juni 2022.
Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Payuluh Sosial Muda
Hanny S. Sas
No. 4680529.199102.2.002

Tembusan:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip

 Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Anggrek No. 2 Kel. Paropo Kec. Panakkukang
Kota Makassar 90231, Sulawesi Selatan

Website : <https://disdik.makassar.go.id>; email : disdikkotamks@gmail.com



SURAT KETERANGAN

NOMOR : /K/Umkep/VII/2022

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 070/0320/K/Umkep/VI/2021 tanggal 23 Juni 2022 Perihal Izin penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FITRIANI AMIR
NIM / Jurusan : 105611118218 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sit Alauddin No.259 Makassar

Benar telah melakukan Penelitian di Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan judul penelitian " *SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN* ".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Juli 2022

An. KEPALA DINAS
Sekretaris

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



M. HARTAWATI, S.Sos., M.M

Pangkat : Pembina

NIP : 19650303 199303 2 007

Lampiran VI Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fitriani Amir
NIM : 105611118218
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	3 %	15 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Juli 2022
Mengetahui
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

 Dipindai dengan CamScanner

BAB I Fitriani Amir - 105611118218

by Tahap Tutup

Submission date: 27-Jul-2022 07:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 1875617471

File name: BAB_I_FITRIANI_AMIR.docx (18.1K)

Word count: 733

Character count: 4597

BAB I Fitriani Amir - 105611118218

ORIGINALITY REPORT

100%

SIMILARITY INDEX

LULUS

11%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

8%

2

www.scribd.com

Internet Source

3%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

On



Dipindai dengan CamScanner

BAB II Fitriani Amir - 105611118218

by Tahap Tutup

Submission date: 27-Jul-2022 07:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 1875617790

File name: BAB_II_FITRIANI_AMIR.docx (191.06K)

Word count: 4095

Character count: 26857

BAB II Fitriani Amir - 105611118218

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

LULUS

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	6%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
4	text-id.123dok.com Internet Source	1%
5	pemudapedulidhuafa.blogspot.com Internet Source	1%
6	proceedings.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	1%
8	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uma.ac.id Internet Source	1%

10	www.scribd.com Internet Source	<1 %
11	m.tiraskita.com Internet Source	<1 %
12	Luthfiyah Kurniawati. "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di SD Djama'atul Ichwan Surakarta", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2019 Publication	<1 %
13	saveanakjalan.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	www.apbi-icma.org Internet Source	<1 %
15	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
16	docplayer.info Internet Source	<1 %
17	es.scribd.com Internet Source	<1 %
18	issuu.com Internet Source	<1 %
19	id.123dok.com Internet Source	<1 %

20

Sekar Novi Prihatin, Luluk Fauziah.
"PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MISKIN BERBASIS UPKU PANCA USAHA DI
DESA MOJORUNTUT KECAMATAN
KREMBUNG", JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik), 2016
Publication

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On



Dipindai dengan CamScanner

SAB III Fitriani Amir - 105611118218



3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

1%

2

www.coursehero.com

Internet Source

1%

3

ekonomis.unbari.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes ☐ Or
Exclude bibliography ☐

Exclude matches ☐

BAB IV Fitriani Amir - 105611118218

by Tahap Tutup

Submission date: 27-Jul-2022 07:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 1875618232

File name: BAB_IV_FITRIANI_AMIR.docx (511.74K)

Word count: 5888

Character count: 37604

BAB IV Fitriani Amir - 105611118218

ORIGINALITY REPORT

100%

SIMILARITY INDEX

turnitin

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sulselprov.go.id
Internet Source

5%

2

adoc.pub
Internet Source

3%

3

123dok.com
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

2%



Dipindai dengan CamScanner

BAB V Fitriani Amir - 105611118218

by Tahap Tutup

Submission date: 27-Jul-2022 07:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 1875618352

File name: BAB_V_FITRIANI_AMIR.docx (16.79K)

Word count: 486

Character count: 3026

BAB V Fitriani Amir - 105611118218

ORIGINALITY

3%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

LULUS

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

1

eprints.uns.ac.id
Internet Source

2%

2

id.123dok.com
Internet Source

2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

< 2%



Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Fitriani Amir lahir di Kota Kupang pada tanggal 18 Agustus 1998, Merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Amirudin dan Hj. Hartawati. Penulis menempuh pendidikan di SDN 4 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara dan. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan serta dapat memberi manfaat kepada orang lain.

Dengan semangat yang tinggi dan motivasi dari orang-orang sekitar, penulis terus berusaha dan belajar akhirnya penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) dengan judul skripsi “ **Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan** ”